



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

Penerapan *Automatic Adjustment* sebagai Instrumen Pengendalian Belanja Operasional: Studi pada LPP RRI Gorontalo

M. Ikhai Al Qudri^a, Lukman Pakaya^b, Muliyani Mahmud^c

^{a,b,c} Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo Jln. Jendral Sudirman No.6, Gorontalo, 96128

Email: mialqudri@gmail.com^a, lukman.pakaya@ung.ac.id^b, muliyani@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 21-06-2026

Revised 09-07-2026

Accepted 11-07-2026

Kata Kunci:

Automatic Adjustment,
Pengendalian Belanja,
Implementasi
Kebijakan, LPP RRI
Gorontalo.

Keywords:

Automatic Adjustment,
Expenditure Control,
Policy Implementation,
LPP RRI Gorontalo.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *Automatic Adjustment* sebagai instrumen pengendali belanja operasional pada LPP RRI Gorontalo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pimpinan satuan kerja dan pelaksana fungsi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dilaksanakan melalui penetapan pagu efektif, revisi TOR dan RAB, penyesuaian kegiatan, serta verifikasi berlapis sebelum realisasi belanja. Kebijakan ini memperkuat disiplin anggaran, tetapi menambah beban administrasi dan membatasi fleksibilitas operasional. Faktor pendukung meliputi komunikasi formal, komitmen pimpinan, kompetensi SDM, dan budaya kepatuhan. Hambatan utama meliputi keterlambatan informasi teknis, revisi berulang, keterbatasan anggaran, dan belum tersedianya SOP khusus.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of *Automatic Adjustment* as an operational expenditure control instrument at LPP RRI Gorontalo and identifies its supporting and inhibiting factors. The study used a descriptive qualitative approach based on interviews, observation, and documentation. Informants consisted of working unit leaders and financial officers. The findings show that the policy was implemented through effective budget ceiling determination, revisions of terms of reference and budget plans, activity adjustment, and layered verification before expenditure realization. The policy strengthened budget discipline, but it also increased administrative workload and limited operational flexibility. Supporting factors include formal communication, leadership commitment, human resource competence, and compliance culture. Main obstacles include delayed technical information, repeated revisions, budget constraints, and the absence of a specific standard operating procedure.

@2026 M. Ikhai Al Qudri, Lukman Pakaya, Muliyani Mahmud

Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran sektor publik menuntut satuan kerja untuk menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, akuntabilitas, dan keberlanjutan layanan.

Anggaran tidak hanya berperan sebagai rencana kerja, tetapi juga sebagai alat pengendalian yang menentukan prioritas kegiatan dan batas penggunaan sumber daya negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Ketentuan tersebut menempatkan belanja operasional sebagai objek pengendalian yang penting karena belanja ini berhubungan langsung dengan kelancaran fungsi organisasi publik.

Dalam kerangka tersebut, *Automatic Adjustment* menjadi instrumen pengendalian fiskal yang digunakan pemerintah untuk menyesuaikan sebagian pagu belanja kementerian dan lembaga. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) menjelaskan bahwa kebijakan ini diarahkan untuk menjaga efektivitas belanja pemerintah melalui rasionalisasi belanja yang belum menjadi prioritas. Sari (2022) juga menegaskan bahwa *Automatic Adjustment* bertujuan mengarahkan anggaran agar lebih fokus pada program yang memberi dampak strategis. Pada tahun anggaran 2025, arah efisiensi tersebut semakin kuat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

LPP RRI Gorontalo menjadi satuan kerja yang mengalami konsekuensi langsung dari kebijakan tersebut. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki kewajiban memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan penguatan nilai kebangsaan. Kegiatan tersebut membutuhkan dukungan belanja operasional yang berkelanjutan, terutama untuk produksi siaran, pemeliharaan peralatan, dukungan administrasi, dan liputan lapangan. Ketika sebagian pagu mengalami blokir atau penyesuaian, satuan kerja harus menata ulang prioritas kegiatan agar layanan utama tetap berjalan.

Dari perspektif akuntansi sektor publik, *Automatic Adjustment* tidak dapat dipahami hanya sebagai pemotongan anggaran. Kebijakan ini mempengaruhi pagu efektif yang dapat digunakan oleh satuan kerja, mekanisme revisi dokumen anggaran, dan pola realisasi belanja. Pagu yang diblokir belum menjadi realisasi belanja, tetapi membatasi ruang eksekusi anggaran sampai ada revisi atau pembukaan blokir. Kondisi tersebut menjadikan *Automatic Adjustment* sebagai data pengendali yang menghubungkan kebijakan fiskal nasional dengan praktik pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja.

Kajian terdahulu mengenai efisiensi dan perubahan anggaran banyak menyoroti penyerapan anggaran, refocusing, atau realokasi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun, kajian yang secara khusus membaca *Automatic Adjustment* pada lembaga penyiaran publik masih terbatas. Kekosongan ini penting karena lembaga penyiaran publik memiliki karakter operasional yang berbeda.

Sebagian kegiatan bersifat rutin, berbasis jadwal siaran, dan sulit dihentikan secara mendadak tanpa mempengaruhi layanan publik.

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana penerapan *Automatic Adjustment* pada operasional Satuan Kerja LPP RRI Gorontalo. Kedua, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi kajian akuntansi sektor publik, khususnya mengenai pengendalian belanja operasional dalam situasi penyesuaian fiskal.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa organisasi perlu memastikan tindakan dan kebijakannya selaras dengan norma, nilai, serta harapan lingkungan sosialnya. Suchman (1995) memandang legitimasi sebagai persepsi bahwa tindakan organisasi sesuai dan dapat diterima dalam sistem nilai yang berlaku. Dalam sektor publik, legitimasi berkaitan erat dengan kepatuhan regulasi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya negara. Deegan (2019) menegaskan bahwa organisasi publik mempertahankan legitimasi melalui kesesuaian antara praktik internal dan tuntutan eksternal.

Automatic Adjustment dapat dibaca sebagai upaya negara menjaga legitimasi fiskal melalui disiplin belanja. Namun, pada tingkat satuan kerja, legitimasi tidak hanya diukur dari kepatuhan pada pagu efektif. Legitimasi juga ditentukan oleh kemampuan organisasi mempertahankan layanan publik. Dengan demikian, LPP RRI Gorontalo harus memenuhi dua tuntutan sekaligus, yaitu patuh pada pengendalian anggaran dan tetap menyediakan layanan penyiaran publik yang relevan.

Implementasi Kebijakan Edward III

Edward (1980) menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai variabel utama implementasi kebijakan. Komunikasi menentukan kejelasan pesan kebijakan dan mengurangi risiko perbedaan tafsir. Sumber daya mencakup kemampuan manusia, dukungan anggaran, informasi, dan sarana kerja. Disposisi menunjukkan sikap pelaksana terhadap kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan alur kewenangan, prosedur, dan koordinasi antarunit. Keempat variabel ini saling terkait dan menentukan keberhasilan kebijakan pada level operasional.

Van Meter & Van Horn (1975) juga menekankan bahwa implementasi

dipengaruhi oleh tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hill dan Hupe (2019) menambahkan bahwa tata kelola operasional perlu adaptif karena kebijakan publik sering berubah mengikuti konteks fiskal dan kelembagaan. Kerangka ini relevan untuk membaca *Automatic Adjustment* karena kebijakan tersebut bersifat top-down, tetapi dampaknya ditanggung langsung oleh satuan kerja pelaksana.

***Automatic Adjustment* dalam Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik menekankan penggunaan anggaran secara akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kinerja. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan publik harus mendukung pelayanan publik tanpa mengabaikan prinsip efisiensi. Dalam praktik *Automatic Adjustment*, sebagian pagu belanja berada dalam status blokir atau cadangan anggaran. Status ini tidak sama dengan realisasi belanja, tetapi mempengaruhi pagu efektif yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Pengendalian belanja menjadi penting karena satuan kerja tidak boleh melakukan komitmen atau realisasi melebihi pagu efektif. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja tetap diakui ketika terjadi pengeluaran dari kas negara sesuai ketentuan akuntansi pemerintahan. Karena itu, *Automatic Adjustment* berfungsi sebagai batas pengendalian sebelum belanja terjadi, bukan sebagai pengakuan belanja. Posisi ini memperlihatkan keterkaitan langsung antara kebijakan fiskal, pengendalian internal, dan pelaporan keuangan sektor publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses, pengalaman pelaksana, dan konteks penerapan *Automatic Adjustment* pada satuan kerja. Moleong (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks alamiah melalui deskripsi kata-kata dan bahasa. Sugiyono (2019a) menegaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat natural dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Lokasi penelitian adalah LPP RRI Gorontalo. Waktu penelitian berlangsung dari November 2025 sampai Maret 2026. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci yang terkait dengan pelaksanaan anggaran dan operasional satuan kerja. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Satker atau KPA, PPSPM, Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran, Penyusun Laporan Keuangan, Verifikator Pajak, dan Penelaah Teknis Kebijakan. Data sekunder diperoleh dari dokumen anggaran, revisi TOR, RAB, laporan realisasi, dan dokumen administrasi terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang proses implementasi, hambatan teknis, dan strategi penyesuaian kegiatan. Observasi digunakan untuk melihat proses pengendalian belanja dan koordinasi internal. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri bukti anggaran, revisi dokumen, dan arsip pendukung. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Pada tahap reduksi, data wawancara dan dokumen dikelompokkan berdasarkan fokus komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Pada tahap penyajian, data disusun dalam uraian naratif dan tabel ringkas. Kesimpulan ditarik melalui perbandingan antarsumber dan diverifikasi kembali dengan dokumen serta pola temuan lapangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Automatic Adjustment*

Hasil penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dengan tujuh informan yang berada dalam lingkup pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan LPP RRI Gorontalo. Informan tersebut terdiri dari Kepala Satuan Kerja/KPA, PPSPM, Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran, Penyusun Laporan Keuangan, Verifikator Pajak, dan Penelaah Teknis Kebijakan. Data lapangan menunjukkan bahwa *Automatic Adjustment* dilaksanakan sebagai mekanisme pengendalian belanja melalui pemblokiran atau penyesuaian sebagian pagu anggaran, sehingga pagu efektif menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi belanja.

Dari aspek komunikasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi kebijakan diterima melalui dokumen resmi, nota dinas, petunjuk teknis, pembaruan sistem anggaran, serta rapat koordinasi internal. Kepala Satuan Kerja menjelaskan bahwa informasi dari pusat diturunkan menjadi arahan operasional agar pagu efektif setelah *Automatic Adjustment* menjadi kontrol utama belanja. Bendahara Pengeluaran juga menyampaikan bahwa informasi disampaikan melalui nota dinas, surat pada aplikasi Srikandi, dan grup WhatsApp internal. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah berjalan secara formal dan terdokumentasi, meskipun jalur komunikasi informal tetap digunakan untuk mempercepat penyebaran informasi.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan adanya hambatan komunikasi. Penelaah Teknis Kebijakan menyatakan bahwa dokumen resmi kadang terbit setelah

perubahan pagu lebih dahulu muncul pada sistem. Kondisi ini membuat satuan kerja menahan eksekusi belanja sampai memperoleh kejelasan teknis. Dengan demikian, masalah utama pada aspek komunikasi bukan terletak pada ketiadaan informasi, melainkan pada sinkronisasi waktu antara perubahan sistem, dokumen resmi, dan arahan teknis pelaksanaan.

Dari aspek sumber daya, hasil lapangan menunjukkan bahwa pegawai bagian keuangan memiliki kemampuan teknis untuk memahami revisi anggaran, membaca pagu efektif, dan menyesuaikan dokumen perencanaan. Penyusun Laporan Keuangan menyatakan bahwa SDM bagian keuangan memahami mekanisme perubahan anggaran, tetapi unit operasional masih memerlukan pendampingan dalam penyusunan ulang TOR dan RAB. Bendahara Pengeluaran menambahkan bahwa perubahan TOR dan RAB menambah beban kerja karena dilakukan di luar jadwal perencanaan normal. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi beban administratif meningkat akibat revisi berulang.

Dari aspek disposisi, sebagian besar informan menerima *Automatic Adjustment* sebagai kebijakan pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan. Verifikator Pajak menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat diterima. Penelaah Teknis Kebijakan menegaskan bahwa satuan kerja tetap memprioritaskan kepatuhan administratif dan regulasi. Kepala Satuan Kerja juga menegaskan bahwa belanja harus sesuai SOP, bukti harus lengkap, dan realisasi tidak boleh melampaui pagu efektif setelah *Automatic Adjustment*. Sikap ini menunjukkan adanya komitmen pelaksana untuk menjaga kepatuhan anggaran, meskipun Penyusun Laporan Keuangan mengakui bahwa revisi berulang dapat menurunkan motivasi pegawai karena menambah ketidakpastian kerja.

Dari aspek struktur birokrasi, wawancara menunjukkan adanya alur pengendalian berlapis. Kepala Satuan Kerja menjelaskan bahwa proses pelaksanaan dimulai dari usulan unit, telaah keuangan, verifikasi PPK, persetujuan pimpinan, penyesuaian dokumen, eksekusi, dan pelaporan. Alur ini berfungsi sebagai kontrol internal agar realisasi belanja tidak melampaui pagu efektif. Akan tetapi, belum tersedia SOP khusus untuk kondisi *Automatic Adjustment*. Kepala Satuan Kerja menyampaikan bahwa idealnya tersedia SOP atau checklist khusus agar respons satuan kerja lebih cepat dan seragam. Bendahara Pengeluaran juga menyatakan bahwa penyusunan ulang TOR dan RAB memerlukan waktu sehingga dapat memperlambat kinerja.

Dampak operasional juga muncul secara nyata. Bendahara Pengeluaran menyampaikan bahwa beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan secara luring dialihkan menjadi daring, sedangkan beberapa kegiatan lain ditiadakan karena pemotongan anggaran. Verifikator Pajak menyatakan bahwa pemotongan anggaran

berpengaruh terhadap kelancaran operasional RRI, terutama pada pembatasan produksi siaran, pemeliharaan peralatan, dan kegiatan liputan. Temuan ini menunjukkan bahwa *Automatic Adjustment* efektif membatasi belanja, tetapi juga mengurangi fleksibilitas satuan kerja dalam menjalankan kegiatan operasional.

Tabel 1. Temuan Utama Hasil Wawancara Penerapan *Automatic Adjustment*

Fokus Wawancara	Pernyataan Lapangan	Hasil yang Diperoleh
Komunikasi	Informasi diterima melalui dokumen resmi, nota dinas, Srikandi, pembaruan sistem, rapat internal, dan grup koordinasi.	Komunikasi formal telah berjalan, tetapi sinkronisasi antara perubahan sistem dan dokumen teknis belum selalu tepat waktu.
Sumber daya	SDM keuangan memahami perubahan anggaran, tetapi unit operasional masih memerlukan pendampingan dalam revisi TOR dan RAB.	Kompetensi pelaksana cukup mendukung implementasi, namun revisi berulang menambah beban administratif.
Disposisi	Pelaksana menerima kebijakan sebagai kewajiban nasional dan tetap memprioritaskan kepatuhan regulasi.	Sikap adaptif dan komitmen kepatuhan menjadi modal penting, meskipun motivasi pegawai dapat menurun akibat ketidakpastian revisi.
Struktur birokrasi	Alur kerja mencakup usulan unit, telaah keuangan, verifikasi PPK, persetujuan pimpinan, penyesuaian dokumen, eksekusi, dan pelaporan.	Verifikasi berlapis memperkuat pengendalian belanja, tetapi ketiadaan SOP khusus membuat respons belum seragam.
Dampak operasional	Sebagian kegiatan dialihkan menjadi daring, sebagian kegiatan ditiadakan, serta liputan, produksi siaran, dan pemeliharaan peralatan dibatasi.	<i>Automatic Adjustment</i> menahan belanja agar sesuai pagu efektif, tetapi mengurangi fleksibilitas operasional satuan kerja.

Sumber: Data penelitian, diolah dari hasil wawancara dan dokumentasi LPP RRI Gorontalo, 2026

Faktor Pendukung dan Penghambat berdasarkan Temuan Lapangan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor pendukung penerapan *Automatic Adjustment* terdiri dari komunikasi formal yang terdokumentasi, komitmen pimpinan, kompetensi SDM keuangan, struktur verifikasi berlapis, dan budaya kepatuhan terhadap regulasi. Komunikasi formal memberi dasar administratif bagi pengambilan keputusan. Komitmen pimpinan memperkuat disiplin belanja karena setiap kegiatan harus mengacu pada pagu efektif. Kompetensi SDM keuangan membantu satuan kerja menyesuaikan dokumen perencanaan dan pelaporan. Struktur verifikasi berlapis membantu mencegah realisasi yang tidak sesuai ketentuan.

Faktor penghambat yang ditemukan di lapangan meliputi perubahan pagu yang mendadak, keterlambatan kejelasan teknis, revisi TOR dan RAB secara berulang, meningkatnya beban administratif, keterbatasan anggaran operasional, potensi penumpukan realisasi pada akhir tahun, dan belum adanya SOP khusus untuk kondisi *Automatic Adjustment*. Hambatan tersebut lebih banyak bersifat administratif dan operasional. Dampaknya terlihat pada penundaan kegiatan, penyesuaian metode pelaksanaan, dan pembatasan kegiatan yang membutuhkan biaya lapangan.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan *Automatic Adjustment*

Kategori	Temuan Lapangan	Konsekuensi	Arah Penguatan
Faktor pendukung	Komunikasi formal, komitmen pimpinan, kompetensi SDM keuangan, verifikasi berlapis, dan budaya kepatuhan.	Kebijakan dapat dijalankan sebagai kontrol belanja dan dasar penyesuaian kegiatan.	Mempertahankan koordinasi internal, memperkuat dokumentasi, dan membakukan alur kerja.
Faktor penghambat	Perubahan pagu mendadak, keterlambatan petunjuk teknis, revisi administrasi berulang, keterbatasan anggaran, dan belum adanya SOP khusus.	Eksekusi kegiatan tertunda, beban kerja meningkat, fleksibilitas operasional berkurang, dan realisasi berpotensi menumpuk.	Menyusun SOP khusus, membuat checklist revisi, dan menyiapkan skala prioritas kegiatan.

Sumber: Data penelitian, diolah dari hasil wawancara dan dokumentasi LPP RRI Gorontalo, 2026

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Automatic Adjustment* bekerja sebagai instrumen pengendalian sebelum belanja direalisasikan. Pagu yang diblokir tidak langsung dibaca sebagai belanja, tetapi membatasi ruang penggunaan anggaran melalui pagu efektif. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, mekanisme ini memperkuat fungsi anggaran sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Mardiasmo (2018) menekankan bahwa pengelolaan keuangan publik harus berorientasi pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Temuan pada LPP RRI Gorontalo menunjukkan prinsip tersebut melalui kewajiban menyesuaikan kegiatan, merevisi TOR dan RAB, serta memastikan bukti belanja lengkap sebelum realisasi dilakukan.

Dari sisi pelaporan, *Automatic Adjustment* tidak mengubah pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran sebelum terjadi transaksi pengeluaran dari Kas Negara. Pagu yang terkena blokir lebih tepat dipahami sebagai pembatasan pagu efektif atau cadangan anggaran sampai terdapat revisi resmi. Dengan demikian, fungsi utama *Automatic Adjustment* dalam temuan ini bukan mencatat pengurangan belanja, melainkan mengendalikan ruang belanja agar satuan kerja tidak melakukan komitmen di luar pagu yang dapat digunakan.

Temuan komunikasi mendukung teori implementasi kebijakan Edward (1980), yang menempatkan komunikasi sebagai syarat penting agar pelaksana memahami isi kebijakan, tujuan, dan prosedur pelaksanaan. Pada LPP RRI Gorontalo, komunikasi sudah berjalan melalui surat resmi, nota dinas, aplikasi Srikandi, pembaruan sistem, dan rapat koordinasi. Namun, keterlambatan dokumen teknis setelah perubahan muncul di sistem menunjukkan bahwa kejelasan dan konsistensi informasi belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini menjelaskan mengapa satuan kerja cenderung menahan eksekusi belanja sampai tersedia kepastian teknis. Temuan ini sejalan dengan Yuniza et al. (2022), yang menunjukkan bahwa perubahan kebijakan anggaran membutuhkan

adaptasi organisasi dan koordinasi yang kuat agar program tetap berjalan sesuai prioritas.

Pada aspek sumber daya, penelitian menemukan bahwa SDM keuangan memahami mekanisme perubahan anggaran, tetapi unit operasional masih membutuhkan pendampingan dalam penyusunan ulang TOR dan RAB. Edward (1980) menegaskan bahwa sumber daya tidak hanya mencakup jumlah pegawai, tetapi juga kemampuan, informasi, kewenangan, dan fasilitas kerja. Karena itu, kompetensi SDM keuangan menjadi faktor pendukung, sedangkan revisi berulang menjadi sumber tekanan administratif. Temuan ini relevan dengan Ibrahim et al. (2024), yang menegaskan bahwa sistem pengendalian internal dan kapasitas aparatur berperan penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, kapasitas SDM membantu satuan kerja menjaga akurasi dokumen anggaran ketika pagu berubah.

Pada aspek disposisi, penerimaan pegawai terhadap *Automatic Adjustment* menunjukkan bahwa pelaksana memiliki sikap patuh terhadap kebijakan pusat. Edward (1980) menjelaskan bahwa disposisi pelaksana menentukan apakah kebijakan hanya dijalankan secara formal atau benar-benar diterima sebagai tugas organisasi. Temuan lapangan menunjukkan adanya penerimaan dan kepatuhan, tetapi juga terdapat risiko penurunan motivasi karena revisi berulang. Hal ini berarti disposisi positif perlu didukung manajemen perubahan, pembagian kerja yang jelas, dan jadwal revisi yang lebih tertata agar beban administratif tidak menurunkan kualitas kerja pegawai.

Pada aspek struktur birokrasi, alur usulan unit, telaah keuangan, verifikasi PPK, persetujuan pimpinan, penyesuaian dokumen, eksekusi, dan pelaporan menunjukkan adanya mekanisme pengendalian internal berlapis. Struktur tersebut memperkuat akuntabilitas karena setiap belanja harus melalui proses verifikasi. Namun, ketiadaan SOP khusus membuat respons terhadap perubahan pagu masih bergantung pada koordinasi ad hoc. Dalam kerangka Edward (1980), SOP diperlukan untuk menyeragamkan tindakan pelaksana dan mengurangi ketergantungan pada arahan situasional. Karena itu, penyusunan SOP *Automatic Adjustment* menjadi kebutuhan praktis untuk mempercepat respons organisasi.

Dalam perspektif teori legitimasi, kepatuhan LPP RRI Gorontalo terhadap pagu efektif merupakan bentuk legitimasi regulatif. Suchman (1995) menjelaskan bahwa legitimasi muncul ketika tindakan organisasi dipandang sesuai dengan norma, aturan, dan harapan lingkungan. Deegan (2019) juga menegaskan bahwa organisasi sektor publik menjaga legitimasi melalui kepatuhan regulasi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik. Temuan penelitian menunjukkan hal tersebut melalui

komitmen pimpinan untuk memastikan belanja tidak melampaui pagu efektif, bukti belanja lengkap, dan proses verifikasi dilakukan sebelum realisasi.

Namun, legitimasi organisasi publik tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi fiskal. Legitimasi juga ditentukan oleh kemampuan organisasi menjaga kualitas layanan publik. Pada LPP RRI Gorontalo, pembatasan produksi siaran, pemeliharaan peralatan, dan kegiatan liputan menunjukkan bahwa efisiensi anggaran memiliki konsekuensi terhadap kelancaran operasional. Temuan ini sejalan dengan Fau dan Wau (2022), yang menemukan bahwa refocusing anggaran menyebabkan perangkat daerah menyesuaikan prioritas program dan mengurangi kegiatan operasional. Putra dan Setiawan (2023) juga menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan pemerintah jika tidak diimbangi dengan prioritas program yang jelas.

Hasil penelitian ini juga mendukung Abidin (2021), Fadli (2022), Rahmadani (2020), Yusuf et al. (2021), dan Yuniza et al. (2022). Secara umum, penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa perubahan anggaran dapat memperkuat disiplin fiskal, tetapi sering memunculkan konsekuensi administratif, koordinatif, dan operasional. Dalam penelitian ini, konsekuensi tersebut tampak pada revisi TOR dan RAB yang berulang, keterlambatan kejelasan teknis, penundaan eksekusi belanja, pengalihan kegiatan luring menjadi daring, serta kebutuhan SOP khusus. Dengan demikian, temuan penelitian tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki konsistensi dengan kajian sebelumnya mengenai perubahan anggaran dan pengendalian belanja sektor publik.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa *Automatic Adjustment* pada LPP RRI Gorontalo berfungsi efektif sebagai kontrol belanja, tetapi belum sepenuhnya bebas dari masalah implementasi. Kebijakan ini memperkuat disiplin anggaran dan akuntabilitas, tetapi memerlukan penguatan komunikasi, SOP khusus, pendampingan unit operasional, dan penajaman prioritas program. Tanpa penguatan tersebut, pengendalian fiskal dapat berjalan secara administratif, tetapi berisiko menekan fleksibilitas layanan penyiaran publik.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penerapan *Automatic Adjustment* pada Satuan Kerja LPP RRI Gorontalo dilaksanakan melalui pemblokiran dan penyesuaian pagu, revisi TOR dan RAB, penyesuaian kegiatan, serta verifikasi berlapis sebelum realisasi belanja. Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian belanja operasional karena menjadikan pagu efektif sebagai batas utama pengeluaran. Dari perspektif akuntansi sektor publik,

Automatic Adjustment mempengaruhi ruang realisasi anggaran, tetapi tidak mengubah pengakuan belanja dalam LRA sebelum terjadi transaksi pengeluaran dari kas negara.

Faktor pendukung penerapan kebijakan meliputi komunikasi formal, komitmen pimpinan, kompetensi SDM keuangan, mekanisme verifikasi, dan budaya kepatuhan terhadap regulasi. Faktor penghambat mencakup keterlambatan informasi teknis dari pusat, perubahan pagu yang mendadak, revisi administrasi berulang, keterbatasan anggaran operasional, potensi penumpukan realisasi, dan belum adanya SOP khusus. Secara keseluruhan, *Automatic Adjustment* efektif untuk memperkuat disiplin fiskal, tetapi perlu diimbangi dengan prosedur yang lebih responsif agar kualitas layanan publik tetap terjaga.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan studi yang hanya dilakukan pada satu satuan kerja, yaitu LPP RRI Gorontalo. Informan penelitian lebih banyak berasal dari fungsi keuangan dan pimpinan, sehingga perspektif teknis dari seluruh unit operasional belum tergali secara luas. Selain itu, pendekatan kualitatif tidak mengukur secara statistik besaran dampak *Automatic Adjustment* terhadap kinerja keuangan dan indikator layanan.

Saran

Penelitian ini menyarankan LPP RRI Gorontalo menyusun SOP khusus *Automatic Adjustment* yang memuat alur revisi TOR, RAB, penyesuaian kegiatan, pengendalian realisasi, dan pelaporan. Satuan kerja juga perlu memperkuat komunikasi internal melalui kanal resmi yang cepat, menyusun skala prioritas kegiatan berbasis layanan utama, serta meningkatkan kompetensi pegawai dalam penggunaan aplikasi keuangan dan penyusunan revisi anggaran. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan beberapa satuan kerja LPP RRI atau instansi pemerintah lain agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas *Automatic Adjustment* sebagai pengendali belanja operasional sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2021). Analisis Implementasi *Automatic Adjustment* terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Kementerian Keuangan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 135-148.
- Bracci, E., Humphrey, C., Moll, J., & Steccolini, I. (2021). Public sector accounting and accountability in times of crisis: Emerging practices and theoretical insights. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(6), 1231-1259. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2020-4857>

- Deegan, C. (2019). *Financial Accounting Theory*. Edisi 5. McGraw-Hill Education.
- Edward, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fadli, M. (2022). Perubahan Perencanaan Anggaran dan Implikasinya pada Efisiensi Belanja Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 11(4), 302-315.
- Fau, J. F., & Wau, M. (2022). Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Nias Selatan. *REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 6(2), 187-191. <https://doi.org/10.33395/remik.v6i2.11470>
- Hill, M., & Hupe, P. (2019). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance*. Edisi 3. Sage Publications.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Edisi 4. Oxford University Press.
- Ibrahim, S. D., Tuli, H., & Mahmud, M. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 412-423.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Kebijakan Automatic Adjustment: Strategi Antisipasi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Andi.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. (2019). Dampak Kebijakan Perubahan Anggaran terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 11(1), 45-99.
- Putra, R., & Setiawan, M. (2023). Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(3), 201-219.
- Rahmadani, S. (2020). Ketidaksesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran pada Sektor Publik. *Jurnal Manajemen Publik*, 8(1), 33-42.
- Sari, F. (2022). Analisis Implementasi *Automatic Adjustment* dalam Pelaksanaan Anggaran. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 7(2), 112-124.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571-610. <https://doi.org/10.5465/AMR.1995.9508080331>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pemerintah Republik Indonesia.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Widodo, J. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Media Nusa Creative.
- Yuniza, M. E., Nandita, N. N. D. R. P., Putri, G. T., & Inggawati, M. P. (2022). Kebijakan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 199-213. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.1037>
- Yusuf, N., Niswatin, Sidik, N. S., & Putri N, S. H. (2021). The Examination of Budgeting Reality at University Based on Public Services Agency. *Research Journal of Finance and Accounting*, 12(22). <https://doi.org/10.7176/RJFA/12-22-10>